

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PETERNAKAN**

**20
24**



Kinerja

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PETERNAKAN**

**JL. Soekarno Hatta No. 168 Telp.(0321) 861784, Fax.(0321)
867163**

JOMBANG 61413



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada tahun 2024. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Capaian kinerja pada tahun 2024 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang di tahun-tahun mendatang.

Jombang, Februari 2025

PE. KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN JOMBANG


Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670217 199403 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	7
1.4 Sumberdaya Aparatur.....	7
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.6 Isu Strategis.....	9
1.7 Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	10
1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja	15
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	15
2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	18
2.2 Perjanjian Kinerja	19
2.3 Rencana Anggaran.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	23
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....	34
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/internasional.....	42
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja.....	44



3.2. Ralisasi Anggaran.....	46
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	46
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	47
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....	51
BAB IV. PENUTUP	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Dinas Peternakan	8
Tabel 1.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	9
Tabel 1.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2024.....	11
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 2.3	Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran.....	21
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....	23
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024.....	25
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.6	Realisasi Sasaran 1 (satu) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026.....	26
Tabel 3.7	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja....	30
Tabel 3.8	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024.....	31
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Program s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA	38
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua).....	41
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024.....	41
Tabel 3.12	Realisasi Sasaran 2 (dua) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026.....	41
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2 (dua).....	42
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	42
Tabel 3.15	Capaian Produksi Daging, Telur dan Susu Nasional.....	48
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Daging Nasional Tahun 2020-2024.	48
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Telur Nasional Tahun 2020-2024...	49
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024...	49
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional.....	49
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	51
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran.....	52
Tabel 3.22	Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Anggaran.....	53
Tabel 3.23	Gambaran Umum Pegawai di Lingkup Dinas Peternakan Kab. Jombang Tahun 2024.....	54
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	55
Tabel 3.25	Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Tahun 2024.....	55
Tabel 3.26	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang
2. Penjanjian Kinerja
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja
6. Data Inventaris



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Jombang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Peternakan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris



Daerah. Dasar pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, **Struktur Organisasi** Dinas Peternakan dengan mendasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Keberadaan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Bupati membawa Kabupaten Jombang melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

- Fungsi Sekretariat:
 - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - h. Pengelolaan aset;



- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Peternakan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Peternakan;



- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

(2) Bidang Budidaya

Bidang Budidaya mempunyai **tugas** pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan.;

- **Fungsi** Bidang Budidaya:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas budidaya dan pengembangan ternak;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak terutama dalam peningkatan mutu bibit;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu makanan ternak;
- d. Pelaksanaan pembiakan dalam rangka peningkatan pengelolaan budidaya ternak;



- e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

(3) Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

• **Fungsi** Bidang Kesehatan Hewan :

- a. Penyusunan dan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan dan standart Pelayanan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan hegien, sanitasi usaha peternakan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sera;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan.

(4) Bidang Agribisnis

Bidang Agribisnis mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan bina



usaha dan rekomendasi perizinan peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- **Fungsi** Bidang Agribisnis:
 - a. Penyusunan program kerja pelaksanaan tugas agribisnis;
 - b. Pelaksanaan identifikasi dan potensi serta perencanaan pengembangan permodalan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistem agribisnis;
 - c. Pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pengolahan data usaha peternakan, promosi pengolahan dan pemasaran hasil usaha peternakan dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis dan untuk statistik usaha peternakan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, analisa penyajian data statistik usaha peternakan serta rekomendasi perizinan bidang usaha dan jasa peternakan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan

(5) UPTD Rumah potong Hewan (RPH)

- Mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Jombang maka Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mempunyai **UPTD Rumah Potong Hewan, kelas B**. UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pemotongan hewan.
- **Fungsi** UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan;
 - c. Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - e. Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat;
 - f. Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan; dan



- g. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, **Struktur Organisasi** Dinas Peternakan dengan mendasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, berkoordinasi dengan:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Kelompok jabatan Fungsional.
- c. Bidang Budidaya, berkoordinasi dengan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, berkoordinasi dengan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Agribisnis, berkoordinasi dengan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran 1.

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang per Desember 2024 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 98 orang yang terdiri dari 7 orang pejabat struktural, 14 orang pejabat fungsional tertentu, 40 pejabat fungsional



umum, serta 70 orang tenaga non PNS. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Dinas Peternakan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan							Pendidikan					
		Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	X	IX	V	S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA
1	Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Sekretaris		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0
3	Kepala Bidang	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
4	Kepala UPTD	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Kepala Sub Bagian	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Fungsional Tertentu	4	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
7	Fungsional Umum	10	5	0	9	6	0	0	0	0	0	0	5	0	3	7
8	Tenaga PPPK	4	6	0	0	0	0	1	6	1		0	0	0	0	0
9	Tenaga Non PNS	60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	53
10	Jumlah ASN (PNS dan PPPK)+ Tenaga Non PNS	81	28	4	21	6	0	1	6	1	0	2	31	0	4	60

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan dalam meningkatkan produksinya akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi lingkungan strategis wilayah dan nasional; lingkungan global dan regional; dan lingkungan strategis politik dan ekonomi sebagai berikut :

1. Lingkungan Strategis Global dan Regional tidak akan terlepas dari aturan aturan perdagangan bebas, terkait dengan diberlakukannya Technical Barrier On Trade, Sanitary Phytosanitary dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa.
2. Lingkungan Strategis Wilayah meliputi :
 - a. Seiringnya jumlah penduduk yang terus meningkat tidak terlepas dari kebutuhan bahan pangan yang berkualitas.
 - b. Terjadinya proses transformasi struktural perekonomian yang berdampak pada menurunnya pangsa pasar dari sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian.
3. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi, yang akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peran pemerintah termasuk berlakunya Undangundang dan peraturan tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

1.6 ISU STRATEGIS

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih banyaknya peredaran daging yang belum sesuai SNI	Pentingnya keamanan pangan	Kurangnya tenaga dan sarana prasarana di RPH untuk mendukung kualitas daging ASUH
2	Pelayanan kesehatan hewan kurang optimal	Pentingnya peningkatan status kesehatan hewan milik masyarakat	Kurangnya SDM/ tenaga di bidang kesehatan hewan (medik/paramedik)
3	Penanganan Hasil Produksi Peternakan tidak sesuai dengan standart ASUH	Kurangnya keamanan produk olahan hasil peternakan	Olahan pangan dari hasil Peternakan belum mendapatkan sertifikasi ijin edar
4	Legalitas kelembagaan masih rendah	Dinamika kelompok kurang maksimal	Sumberdaya Manusia (kelompok ternak) masih rendah
5	Produksi hasil ternak (daging, telur, susu) kurang optimal	Swasembada hasil ternak tidak terwujud	Produktifitas ternak rendah
6	Kualitas dan kuantitas pakan ternak kurang optimal	Populasi dan Produksi ternak makin menurun	Kualitas dan kuantitas Hijauan Pakan Ternak rendah
			Pengawasan Mutu Pakan kurang Optimal

Isu Strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pentingnya keamanan pangan;
2. Pentingnya peningkatan status kesehatan hewan milik masyarakat;
3. Kurangnya keamanan produk olahan hasil peternakan;
4. Dinamika kelompok kurang maksimal;
5. Swasembada hasil ternak tidak terwujud;
6. Populasi dan Produksi ternak makin menurun;

1.7 SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, Sarana dan Prasarana gedung perkantoran dan gedung penunjang teknis yang ada di Dinas Peternakan :

1. Rumah Potong Hewan ada 4 (Jombang, Ploso, Mojoagung dan Ngoro)
2. Puskesmas ada 4 (Puskesmas Jombang, Ploso, Ngoro dan Mojoagung)
3. Klinik Hewan type C
4. Pusat Perbibitan Ayam Lokal (Chicken Development Centre)

Sarana mobilitas kendaraan maupun peralatan perkantoran tentu menjadi faktor yang sangat strategis dalam menunjang proses bekerja seluruh aparatur. Dalam kaitan ini maka sesuai Buku Inventaris barang milik daerah yang tercatat di Dinas Peternakan adalah sebagaimana tersebut pada daftar lampiran 2.

1.8 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektur Nomor X.700/552/415.15/2024 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024, Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar 78,03% dengan kategori (BB) Sangat Baik, yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang atau unit di Dinas Peternakan yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, agar :

1. Melakukan koreksi atas ketidakselarasan antara hambatan, rekomendasi dan tindaklanjut pada Serita Acara Monitoring dan Evaluasi Renstra.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
3. Menambahkan catatan atas ketercapaian target keseluruhan pegawai dalam LKJ Individu.



4. Melakukan koreksi pada Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tentang Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Bagi Pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dengan menambahkan kriteria rinci untuk pemberian *punishment* maupun *reward*.
5. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah.
6. Cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
7. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
8. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja dan capaian kinerja (*outcome*) berikutnya.

1.7 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
I	PENDAPATAN DAERAH	557.811.600	315.874.600
	Hasil Retribusi Daerah	557.811.600	315.874.600
	Retribusi Jasa Usaha	557.811.600	315.874.600
	Retribusi Rumah Potong Hewan	452.800.000	251.400.000
	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	45.000.000	45.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.011.600	56.438.900



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	60.011.600	56.438.900
	Penjualan Hasil Peternakan	60.011.600	56.438.900
II	BELANJA LANGSUNG	8.755.383.024	10.491.720.224
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,679,411,462	7.054.366.282
	I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.073.700	19.723.700
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.284.700	10.284.700
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.149.250	10.149.250
	II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.671.465.396	5.695.624.222
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.528.768.996	5.532.258.822
	4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	131.965.000	152.634.000
	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.376.850	4.376.850
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.354.550	6.354.550
	III Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000
	7 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.000.000	24.000.000
	IV Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.333.637	531.355.984
	8 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.534.750	3.534.750
	9 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.610.358	73.232.705
	10 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.250.000	285.250.000
	11 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.830.529	16.830.529
	12 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.056.000	57.056.000
	13 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.052.000	95.452.000
	V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	47.791.800
	14 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	15.468.600
	15 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	32.323.200
	VI Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.560.000	416.016.200
	16 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.400.000	124.276.200



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	17 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.160.000	291.740.000
	VII Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.644.500	255.122.396
	18 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.010.000	40.010.000
	19 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.384.500	112.384.500
	20 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	43.657.896
	21 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.250.000	59.070.000
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.205.137.206	10.671.447.375
	VIII Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6.107.627.406	10.573.937.575
	22 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	97.509.800	97.509.800
	IX Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.107.627.406	10.573.937.575
	23 Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	6.107.627.406	10.573.937.575
	X Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0	16.284.132
	24 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	0	16.284.132
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	405.805.462	405.789.527
	XI Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.841.192	82.218.192
	25 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	82.841.192	82.218.192
	XII Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.340.900	45.947.965
	26 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	49.340.900	45.947.965
	XIII Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	273.623.370	277.623.370
	27 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	273.623.370	277.623.370
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	93.799.390	22.446.890



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH PAGU ANGGARAN	
		APBD Murni	APBD Perubahan
	XV Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	93.799.390	22.446.890
	28 Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	93.799.390	22.446.890

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Perencanaan strategis atau disebut dengan Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Melalui PK, terwujudlah komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 mengacu dengan sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah: **“Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan”**

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah: **“Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu*
2. *Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah*



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan



4. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- **Program & Kegiatan yang terkait:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 kedepan akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu	%	3,29
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		80,2

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2024 mengacu pada RKT Tahun 2023. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan sub kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan yaitu :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	3,41
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	6.990.344.552
2.	Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai	66,67 %	10.671.447.375
3.	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	82 %	405.789.527



NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
			Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	88 %	
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Prosentase ketersediaan Prasarana peternakan yang memadai	10 %	16.284.132
4.	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	Program Perizinan Usaha Peternakan	Prosentase Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha	67 %	22.446.890
5.	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ternak	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	3,41 %	514.910.519
					18.621.222.995

Dari sasaran tersebut terdapat 5 (Lima) program yang mendukung keberhasilan capaian target indikator sasaran tersebut. Masing-masing sasaran memiliki indikator sasaran yang didukung oleh beberapa program. Sasaran dan program yang ditetapkan tersebut menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 antara Kepala Dinas Peternakan dengan Bupati Kabupaten Jombang.

2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 14.017.501.260,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 18.567.135.113,-.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 memiliki dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui dana APBD Perubahan Tahun 2024 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.



Tabel 2.3. Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	%
1.	Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan	11.630.878.443	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	6.990.344.552	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan bidang Peternakan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Peternakan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran atau juga dengan membandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Presentase pertumbuhan produksi daging susu dan telur	3,41	2,83	82,99
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2	78,03	97,29

Dari sasaran strategis Dinas Peternakan, kinerja yang dicapai menunjukkan telah memenuhi kriteria tinggi dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 90,14%. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Peternakan Tahun 2024 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis di bawah.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada

Tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Indikator sasaran strategis 1 (satu) adalah

”Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu”

Pangan asal ternak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan Masyarakat. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Kurangnya konsumsi protein hewani dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting pada anak, anemia, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesejahteraan peternak lokal. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kabupaten Jombang.



Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI (Ton)		PERTUMB. (%)
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Daging	24.697	22.950	-7,07
2	Telur	15.574	15.897	2,07
3	Susu	12.976	15.904	22,56
TOTAL		51.545	54.752	2,83

Sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kambing, domba, ayam, itik, entok dan kelinci), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersediaan Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, entok dan kelinci dalam bentuk meatyield. Pada tahun 2024, capaian produksi daging sebesar 22.950 ton atau turun 7,07 persen dari tahun 2023 yaitu sebesar 24.697.

Tabel 3.4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Presentase pertumbuhan produksi daging susu dan telur	3,41	2,83	82,99

Pencapaian Kinerja sasaran startegis pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebesar 82,99 persen hal ini merupakan hasil kerja keras dan wujud komitmen pimpinan serta jajaran Dinas Peternakan dalam meningkatkan kinerja yang tertuang dalam Strategi Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024. Dalam rangka memberi kontribusi terhadap terwujudnya peningkatan PDRB Pertanian secara umum, maka OPD Dinas Peternakan Berkontribusi meningkatkan PDRB Sub Sektor Peternakan. Meningkatnya PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi ternak dengan indikator adalah meningkatnya produksi daging, telur dan susu.

Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu di Kabupaten Jombang terealisasi sebesar 2,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,41 % dengan nilai capaian sebesar 82,99 % sehingga target belum dapat dicapai. Secara umum produksi ternak mengalami penurunan. Produksi daging mengalami penurunan karena turunnya angka pemotongan ternak di RPH dan menurunnya angka populasi sapi potong sedangkan untuk komoditas lain populasi meningkat tetapi tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi daging. Pada ternak unggas populasi berbanding lurus dengan produksi baik daging maupun telur sehingga produksi telur mengalami peningkatan karena populasi ternak unggas penghasil telur meningkat. Sedangkan untuk produksi susu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan karena produksi susu berbanding lurus dengan populasi sapi perah untuk produksi susu pemasaran hasil dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (netsle dan indolakto). Meskipun terjadi wabah minat masyarakat untuk berternak masih tinggi karena ada jaminan ganti rugi dari pemerintah dan adanya pelayanan inseminasi buatan, PKB, Pelayanan kesehatan ternak terpadu serta asuransi ternak AUTS kepada masyarakat.

Tabel 3.5. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	3,41	3,25	3,30	2,83

Bila dilihat sasaran indikator kinerja OPD Dinas Peternakan terhadap pertumbuhan produksi yang ditargetkan tahun 2024 adalah sebesar 3,41 persen, berdasarkan realisasi sebagaimana tabel diatas dapat dicapai 2,83 persen atau terealisasi sebesar 82,99% . Untuk tingkat konsumsi daging tahun 2024 tingkat konsumsi daging masyarakat Kabupaten Jombang sebesar 14,84 kg/kapita/tahun atau turun sebesar 15,49 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 17,56 Kg/kapita/tahun. Ketersediaan Produksi telur tahun 2024 sebesar 15.896 ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun



2023 yaitu sebesar 15.574 ton. Konsumsi telur selama tahun 2024 sebesar 10,43 kg/kapita/Tahun sedangkan tahun 2023 sebesar 11,22 kg/kapita/tahun atau menurun sebesar 7,04 persen

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 yang menyebabkan prosentase pertumbuhannya hanya tercapai 82,99% dari target diantaranya :

- **Faktor lingkungan dan cuaca ekstrim**

Perubahan cuaca yang ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim, dapat secara signifikan mempengaruhi produksi daging, telur dan susu. Adanya perubahan suhu yang tinggi, kelembaban, dan pola curah hujan di sepanjang tahun 2024 berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas ternak. Perubahan Cuaca ekstrim terhadap produksi daging, telur dan susu berdampak pada meningkatnya angka cekaman stress pada ternak. Stress akibat suhu panas dapat menurunkan nafsu makan ternak, menghambat pertumbuhan, meningkatkan angka kematian dan mengurangi produksi daging.

- **Faktor ekonomi dan harga pasar**

Pertumbuhan produksi hasil peternakan tahun 2024 terutama daging dan telur sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan harga pasar. Faktor ekonomi dan harga pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produksi daging dan telur di Kabupaten Jombang. Perubahan harga pasar, baik harga daging dan telur maupun pakan ternak tentu dapat menghambat pertumbuhan produksi hasil peternakan. Jika harga daging dan telur naik, peternak cenderung meningkatkan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga turun maka peternak akan mengurangi produksi atau bahkan menghentikannya jika tidak lagi menguntungkan.

Tabel 3.6. Realisasi Sasaran 1 (satu) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Presentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu	2,93%	2,83%	96,59%

Presentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu di Kabupaten Jombang tahun 2024 terealisasi sebesar 2,83% dengan tingkat capaian kemajuan sebesar 96,59% di Tahun pertama renstra yang seharusnya tercapai 50% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas peternakan untuk peningkatan produksi daging telur dan susu sudah memenuhi target dan berhasil mencapai target akhir RPJMD. Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa capaian indikator kinerja mengalami keberhasilan. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan antara lain : 1) Pertumbuhan populasi ternak yang terus mengalami peningkatan seiring dengan penerapan berbagai program/kegiatan strategis dan tepat sasaran berbasis peternakan rakyat sehingga Produksi komoditas utama peternakan yakni daging, telur dan susu terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. 2) Keberhasilan Program Penjaminan Kesehatan Hewan dalam menekan angka kejadian penyakit hewan strategis dan angka kematian ternak meskipun pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD pada tahun 2023 namun upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan agar penyebaran PMK dan LSD tidak meluas telah dilakukan secara maksimal dengan pengobatan pemberian vitamin dan vaksinasi pada ternak. 3) Pembinaan, fasilitasi dan sertifikasi unit usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan, baik pangan maupun non pangan. 4) Pembinaan kelembagaan peternak 5) Pembinaan, fasilitasi pakan ternak dalam rangka mendorong peningkatan populasi dan produktivitas komoditas utama peternakan di Kabupaten Jombang.



Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah – langkah strategis kedepan sebagai berikut :

- 1) Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak,
- 2) Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil
- 3) Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
- 4) Penjaminan produk asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal yang sesuai dengan standar Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai produksi pangan asal ternak adalah sebagai berikut :

- Sebagian besar pakan ternak masih diimpor atau diproduksi di luar daerah, sehingga harga menjadi mahal
- Kurangnya lahan untuk subsektor peternakan
- Peternak yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang manajemen peternakan modern belum merata
- Adanya peningkatan harga pakan ternak
- Masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia terkait produksi aneka ternak lainnya
- Kurangnya Akses informasi pasar untuk pemasaran produk lebih luas
- Peternak masih menggunakan metode tradisional dan kurang memahami teknik modern untuk meningkatkan hasil produksi

Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai target produksi daging dan telur pada akhir Renstra 2024 adalah sebagai berikut :

- Adanya pertumbuhan populasi dan ekonomi meningkatkan permintaan daging, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri makanan
- Pasar produk hewani setiap tahun meningkat dilihat dari peningkatan konsumsi akan produk peternakan setiap tahunnya
- Penggunaan inovasi teknologi modern dalam budidaya walet



- Mengarahkan Kepala Bidang Agribisnis untuk menyiapkan data mengenai harga produsen, harga di konsumen, data ketersediaan dan data kebutuhan ayam dan telur
- Konsolidasi dengan stakeholder

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyusun program kegiatan terkait pengembangan SDM
- Menyusun program kegiatan terkait penyuluhan akses informasi pasar
- Mempermudah akses perizinan dan membuka peluang ekspor dengan regulasi yang lebih mendukung
- Berkoordinasi terkait penyediaan lahan khusus untuk padang penggembalaan sebagai sumber pakan ternak
- Mengembangkan program pelatihan tentang teknologi modern dalam pemeliharaan ternak, manajemen pakan, dan kesehatan hewan.

Tabel 3.7. Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	82,99	96,08	0,86

Pada sasaran pertama Meningkatnya Produksi Peternakan memiliki tingkat efisiensi Tahun 2024 (0,86). Nilai (+) tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja. Tercapainya sasaran 1 (satu) ini didukung 4 (empat) program yaitu:



Tabel 3.8. Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan	10.671.447.375	10.257.104.198	96,12	66,67%	71,42%	107,13
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pakan yang Beredar di Masyarakat yang sesuai standart	97.509.800	95.098.000	97,53	84,6%	84,6%	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	97.509.800	95.098.000	97,53	4 Laporan	4 Laporan	100
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak	10.573.937.575	10.161.334.400	96,1	19.062.584 ekor	18.237.638 ekor	95,67
	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	10.573.937.575	10.161.334.400	96,1	1.610 ekor	1.761 ekor	109,38
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase ketersediaan Prasarana peternakan yang memadai	16.284.132	16.277.700	99,96	100%	100%	100
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana yang terhabilitasi dan terbangun	16.284.132	16.277.700	99,96	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	16.284.132	16.277.700	99,96	1 Unit	1 Unit	100
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	405.789.527	384.047.565	94,64	82%	82,2%	100,2
		Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat				88%	90,97%	103,37



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	82.218.192	82.194.715	99,97	3,6 %	8,17%	226,9
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	82.218.192	82.194.715	99,97	21 kecamatan	21 kecamatan	100
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	45.947.965	45.834.600	99,75	3 Jenis	3 Jenis	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	45.947.965	45.834.600	99,75	20 Laporan	40 Laporan	200
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pengawasan Persyaratan teknis Kesehatan hewan	277.623.370	256.018.250	92,22	11.670 ekor	10.838 ekor	92,88
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	277.623.370	256.018.250	92,22	4 unit	4 Unit	100
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	22.446.890	22.295.270	99,32	67%	70%	104,48
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang memenuhi syarat	22.446.890	22.295.270	99,32	15 Rekom	17 Rekom	113,33
	Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	22.446.890	22.295.270	99,32	15 Dokumen	17 Dokumen	113,33



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	514.910.519	479.900.750	93,2	3,41%	4,44%	130,2
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase poknak yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas	514.910.519	479.900.750	93,2	14,33%	14,68%	102,44
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	514.910.519	479.900.750	93,2	42 unit	43 unit	102,38

a. Sasaran Program 1

Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak

Capaian indikator Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai terhadap target tahun 2024.

Capaian Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai sebesar 71,42%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 66,67% maka diperoleh capaian prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai sebesar 107,13% dengan kategori **sangat berhasil**.

Keberhasilan capaian kinerja Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Dinas Peternakan sudah sesuai dengan sasaran. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, diantaranya pendistribusian ternak tahun 2024 terealisasi sebesar 1.761 ekor dari target sebesar 1.610 diperoleh capaian sebesar 109,38% dengan kategori **sangat berhasil**.

b. Sasaran Program 2

Terlaksananya Ketersediaan Prasarana yang memadai.

Transformasi menuju Peternakan Modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi. Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi

aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitas.

Capaian indikator Prosentase ketersediaan prasarana peternakan yang memadai sebesar 10%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 10%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini sebesar 100% atau masuk dalam kategori **Berhasil**.

c. Sasaran Program 3

Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan

Indikator prosentase wilayah yang terkendali penyakit menular strategis merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit HLT, Brucellosis, SAL, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2024 Kasus penyakit Avian Influenza (AI) pada unggas tahun 2024 di wilayah Kabupaten Jombang tidak ada laporan (nihil) yang mana sejalan dengan kondisi di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kesadaran peternak unggas akan pentingnya vaksinasi dan biosekuriti. Vaksinasi teratur sesuai jadwal dan strategi biosekuriti yang ketat membawa dampak baik yaitu peningkatan kekebalan ternak dan menurunnya ancaman serangan virus di lapangan.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit menular pada hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi yang besar karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Sebagaimana telah diketahui, Penyakit mulut dan kuku di wilayah Kabupaten Jombang telah mewabah pada tahun 2022 dengan jumlah kasus tercatat 7.877 ekor. Pada tahun 2023 menurun secara signifikan menjadi 476 ekor, sedangkan tahun 2024 tercatat 348 kasus. Gambaran kasus PMK di hampir sepanjang Tahun 2024 (bulan Januari s/d akhir November 2024) kejadian PMK sangat terkendali. Namun sejak awal Desember 2024 terjadi lonjakan kasus PMK yang signifikan. Tercatat periode 8 Desember 2024 – 5 Januari 2025 kasus PMK tercatat sejumlah 379 ekor. Untuk data vaksinasi PMK tahun 2024 tercatat lebih dari 150.000 dosis pada ternak sapi, kambing dan domba. Beberapa hal yang menjadi penyebab adanya lonjakan kasus PMK di antaranya : (1) Perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan. Di mana saat musim penghujan ketahanan tubuh ternak cenderung menurun. (2) Peningkatan lalu lintas sapi yang belum divaksin antar wilayah (3) Kekebalan ternak terhadap PMK secara umum menurun karena perlambatan capaian vaksinasi 5 bulan terakhir. Bahkan sejak bulan November 2024 kegiatan vaksinasi terhenti karena ketidakersediaannya vaksin PMK dari pemerintah telah habis.

Vaksinasi PMK pada ternak secara teratur setiap 6 bulan sekali pada ternak menjadi kunci utama dalam upaya mengendalikan penyakit. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini sedang menjadi trend wabah penyakit pada ternak berkuku genap di wilayah Indonesia. Penularan PMK terhadap hewan ternak lainnya berlangsung sangat cepat. Sehingga langkah komprehensif perlu dilakukan selain vaksinasi. Salah satunya adalah peternak perlu diarahkan untuk selalu menjaga



kebersihan kandang dan rutin melakukan desinfeksi dan pentingnya tindakan karantina/isolas jika ada ternak yang mengalami ciri-ciri terserang PMK. Data capaian hasil vaksinasi PMK tahun 2024 tercatat lebih dari 155.000 dosis (sebagian besar dilaksanakan pada periode bulan Januari s/d Juli 2024) dengan sasaran pada ternak sapi, kambing dan domba. Jumlah tersebut secara keseluruhan menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 210.000 dosis.

Kasus Penyakit LSD (Penyakit Kulit Berbenjol) di Jombang pada tahun

2024 tercatat hanya ada sejumlah 1 kasus dan telah dinyatakan sembuh. Kondisi pada tahun 2024 tentu mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun

2023 yang mana jumlah kasus LSD mencapai 1.846 kasus. Kasus penyakit LSD menyebar dipicu oleh penularan melalui gigitan serangga. Beberapa Langkah/Upaya Pengendalian dan Penanggulangan LSD yang telah dilaksanakan yaitu deteksi dini, peningkatan kebersihan kandang dan menekan populasi serangga di sekitar kandang serta tentunya upaya vaksinasi dan peningkatan pengawasan lalulintas ternak antar kabupaten/antar provinsi menjadi kunci utama dalam menekan kasus penyakit LSD, Tahun 2024 vaksinasi LSD total 1.319 ekor sapi. Saat ini Kabupaten Jombang tercatat sudah nihil (zero case) LSD. Kasus Salmonellosis (SAL) pada tahun 2024 dilaporkan nihil sedangkan tahun 2023 tercatat 1 kasus. Kasus SAL tercatat dari hasil pengujian laboratorium terhadap 1 produk hewan (daging unggas) di Pasar Blimbing di Wilayah Kecamatan Gudo. Walaupun jumlah kasus SAL terbilang sangat kecil namun upaya-upaya seperti peningkatan higiene sanitasi dan desinfeksi pada unit produksi (di peternakan, rumah pemotongan hewan dan di unit penjualan produk hewan) perlu terus dilaksanakan dengan baik.

Indikator Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai



proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan pangan berupa keamanan, mutu, dan gizi. Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan pangan segar asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan. Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat tahun 2024 sebesar 90,97%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 256 sampel dibandingkan dengan jumlah



sampel produk pangan segar asal hewan secara keseluruhan sebanyak 324 sampel dikalikan 100%.

d. Sasaran Program 4

Terlaksananya peningkatan rekomendasi ijin usaha

Indikator Capaian Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha merupakan perbandingan realisasi rekomendasi izin usaha terhadap target tahun 2024.

Capaian Indikator prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 70%, maka realisasi Indikator mencapai 104,48% atau masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”

e. Sasaran Program 5

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ternak Indikator Capaian Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat Capaian Indikator Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya adalah sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 70%, maka realisasi Indikator mencapai 104,48% atau masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Program s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai	81%	71,42%	88,17%
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Ketersediaan Prasarana Peternakan yang Memadai	100%	100%	100%



NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis	84%	82,2%	97,86%
		2. Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat	89%	90,97%	102,2%
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha	73%	70%	95,89%
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	3,45%	4,44%	128,7%

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur tahun 2024 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 100% maka saat ini sudah mencapai 100% karena target tersebut mengacu pada Renstra Dinas Peternakan Tahun 2024-2026.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai tahun 2024 sebesar 71,42% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 81% sudah mencapai 88,17%.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase Ketersediaan Prasarana Peternakan yang Memadai tahun 2024 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 100% sudah terealisasi 100% sesuai rencana.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit menular strategis tahun 2024 sebesar 82,2% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 84% sudah terealisasi 97,86% sesuai rencana. Hal ini dapat tercapai karena adanya strategi pencegahan penularan zoonosis dilakukan melalui koordinasi instens antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan zoonosis.



Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang beredar di masyarakat tahun 2024 sebesar 90,97% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 89% sudah terealisasi 102,2% sesuai rencana. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta pelaku usaha poduk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Capaian realisasi indikator kinerja Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha tahun 2024 sebesar 70% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 73% sudah terealisasi 95,89%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran strategis 1 (satu) adalah

” Nilai Akuntabilitas Kinerja”

Akuntabilitas kinerja mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara transparan, efektif, dan efisien,serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kepuasan masyarakat mengukur sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Kepuasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecepatan pelayanan, kualitas layanan, keterbukaan informasi, serta responsivitas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Meningkatkan kedua aspek ini, perangkat daerah perlu menerapkan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang berbasis hasil, memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.10. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2	78,03	97,29

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Peternakan sebesar 78,03 dari target yang ditetapkan sebesar 80,2 dengan nilai capaian sebesar 97,29% hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan manajemen kinerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang masih belum memuaskan dengan katagori (BB). Karena itu masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,2	80,13	80,14	78,03

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja mengalami penurunan poin sebesar 2,11. Penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP tahun 2023 dan 2024 memiliki perbedaan di beberapa bobot poin penilaian.

Tabel 3.12 Realisasi Sasaran 2 (dua) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79	78,03	98,77

Dari tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 mencapai nilai 78,03 sedangkan target akhir Renstra nilai sebesar 79, Dengan tingkat capaian sebesar 98,77% di tahun pertama renstra yang seharusnya nilai



evaluasi SAKIP sudah tercapai sebesar 79, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas peternakan untuk peningkatan nilai evaluasi SAKIP masih perlu ditingkatkan untuk bisa memenuhi target akhir RPJMD.

Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2 (dua)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	97,29	94,61	1,05

Pada sasaran ketiga Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tingkat efisiensi 1,03%, sehingga dengan anggaran 94,61% dapat mencapai rata-rata capaian kinerja 97,29%. Tercapainya sasaran 2 (dua) ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1.458.085.730	1.339.570.191	91,87	100%	100%	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	20.433.950	20.339.550	99.54	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.284.700	10.190.400	99.08	4 dokumen	4 dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	10.149.250	10.149.150	100	20 Laporan	20 Laporan	100



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	126.913.350	126.688.225	99,82	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.365.400	163.353.300	99,99	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.376.850	4.368.800	99,82	1 Laporan	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.354.550	6.350.500	99,94	17 Laporan	17 Laporan	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan	24.000.000	23.205.000	96.69	100%	97,5%	97,5
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	24.000.000	23.205.000	96.69	40 Stel	39 Stel	97,5
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	531.355.984	483.951.159	91,08	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.534.750	3.500.200	99,02	1 Paket	1 Paket	100



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73.232.705	72.635.700	99,18	6 Paket	6 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	285.250.000	240.861.800	84,44	2 Paket	2 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.830.529	16.820.800	99,94	2 Paket	2 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	57.056.000	54.800.000	96,05	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.452.000	95.332.659	99,87	88 Laporan	89 Laporan	101,14
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	416.016.200	351.524.387	84,50	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	124.276.200	118.770.051	95,57	12 Laporan	12 Laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	291.740.000	232.754.336	79,78	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	255.122.396	250.744.795	98,28	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.010.000	39.434.300	98,56	1 unit	1 unit	100



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112.384.500	111.658.629	99,35	10 unit	15 unit	150
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	59.070.000	57.670.000	97,3	69 unit	69 unit	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	47.791.800	46.452.000	97,20	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15.468.600	14.552.000	94,07	11 Unit	11 Unit	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32.323.200	31.900.000	100	6 Unit	6 Unit	100

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota memiliki outcome, Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 100% yang berarti layanan kesekretariatan berjalan sesuai dengan prosedur dan keluhan pengguna layanan telah seluruhnya ditindaklanjuti, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu dengan capaian 100% dari target 100% atau capaian 100%. Terdapat 4 dokumen yang disusun tepat waktu. Dokumen yang telah disusun tepat waktu adalah RENJA 2024, RENJA Perubahan, DPA, RKA, dan 20 Laporan yang terdiri dari LKjIP, LKPJ, LPPD, Satu Data, Evaluasi Kinerja Tribulan, Data Statistik Peternakan Bulanan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran 2024 adalah 99,82.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Realisasi Tingkat Pengelolaan kepegawaian 39 stel dari target 40 Stel.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum 100% dari target 100% atau capaian 100%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2024.
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Realisasi Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah 100% dari target 100%. Dinas Peternakan memiliki jumlah BMD asset tetap dan BMD aset lainnya.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% dari target 100%.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi capaian Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik 100% dari target 100%

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
2. Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut;
3. Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang kebijakan administrasi umum dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan;
4. Kurangnya pemahaman dan pelatihan staf tentang regulasi pengadaan daerah dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pengadaan;
5. Ketidakmampuan untuk menyediakan dukungan keuangan yang memadai dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan jasa penunjang urusan



6. Ketidacukupan anggaran untuk pemeliharaan dapat membatasi kemampuan untuk menjaga dan memperbaiki barang milik daerah secara teratur

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi yang memadai telah memudahkan pengukuran dan pemantauan indikator kinerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
3. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang jelas dan terstandarisasi
4. Penerapan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
5. Adanya kebijakan yang jelas dan mendukung dalam pengadaan barang milik daerah
6. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
7. Pengelolaan inventaris BMD yang baik

Adapun upaya dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat
2. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menetapkan Indikator Sasaran yaitu Meningkatnya populasi dan produksi sub sektor peternakan dengan indikator sasaran adalah persentase pertumbuhan populasi dan produksi sub sektor peternakan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.15. Capaian Produksi Daging Telur dan Susu Nasional

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Sapi	378,25	339,75	365,51	374,43	461,30	478,85
2	Kerbau	18,57	13,88	14,19	16,54	16,16	17,39
3	Kambing	49,42	41,86	40,51	41,22	56,34	56,89
4	Domba	47,92	37,05	34,67	35,67	48,16	34,59
5	Babi	159,42	189,81	176,00	102,48	135,04	130,87
6	Ayam Buras	292,33	270,21	269,80	276,73	143,79	156,45
7	Ayam Ras Pedaging	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.668,88	3.721,64	3.835,92
8	Itik	39,81	35,75	41,02	44,65	33,03	33,82
Jumlah		4.480,80	4.147,43	4.127,40	4.560,59	4.615,46	4.744,78
Pertumbuhan Produksi Daging Komoditas Utama			-7,44%	-0,48%	10,50%	1,20%	2,80%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam *meatyield*, 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Ayam Buras	246,69	358,86	368,70	389,27	214,73	236,65
2	Ayam Ras Petelur	4.753,38	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.116,07	6.342,71
3	Itik	294,01	316,95	313,84	316,17	200,21	236,48
4	Itik Manila	25,86	24,65	24,27	22,02	26,17	27,62
5	Puyuh	34,67	32,35	30,63	33,18	28,30	32,83
Jumlah		5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.585,49	6.876,28
Pertumbuhan Produksi Telur			9,71%	0,32%	7,58%	3,87%	4,42%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

No	Jenis Komoditas	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Susu Sapi	944,54	946,91	946,39	824,27	787,37	808,35
Pertumbuhan Produksi Susu			0,25%	-0,06%	-12,90%	-4,48%	2,66%

Keterangan :

*) Angka Sementara (dalam 000 ton)

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

Tabel 3.16. Realisasi Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Daging Nasional Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	0,40	0,85	7,92	2,82	2,86
Realisasi ISP (%)	-7,44	-0,48	10,50	1,20	2,80
Capaian ISP (%)	0,00	0,00	120,00	42,55	97,90

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Telur Nasional Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	2,15	2,15	6,46	1,51	1,51
Realisasi ISP (%)	9,71	0,32	7,58	3,87	4,42
Capaian ISP (%)	120,00	14,88	117,34	120,00	120,00

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi ISP	2020	2021	2022	2023	2024
Target ISP (%)	2,50	0,55	0,61	1,25	1,25
Realisasi ISP (%)	0,25	- 0,06	- 12,90	- 4,48	2,66
Capaian ISP (%)	10,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian tahun n	Capaian Nasional
Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu	100,3%	113%

Capaian kinerja indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tahun 2024 sebesar 101% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional dengan capaian kinerja sebesar 113%.

Adanya realisasi indikator kinerja prosentase pertumbuhan produksi hasil peternakan pada tahun 2024 yang tidak sebanding antara Kabupaten Jombang (100,3%) dengan capaian rata-rata nasional (113%). Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui analisis dan faktor yang mempengaruhinya.



- Pada umumnya ternak merupakan aset hidup (livestock) dalam tata kehidupan masyarakat peternak di Jombang. Ternak bukan merupakan komoditi bisnis, tapi lebih berfungsi kepada status sosial masyarakat, atau juga merupakan sumber tenaga kerja. Akibatnya, peternak akan menjual ternaknya jika mereka memerlukan uang tunai. Oleh karenanya, fluktuasi dan gejolak harga ternak biasanya terjadi bersamaan dengan terjadinya gejolak kebutuhan sosial atau keluarga, terutama pada kegiatan hari-hari besar keagamaan, sosial dan kebudayaan.
- Usaha peternakan sapi potong, sapi perah, domba dan kambing di Kabupaten Jombang sebagian besar dimiliki oleh peternakan rakyat, kecuali ayam ras. Keseluruhan usaha tersebut selama ini kondisi peternakan rakyat masih tidak beranjak bahkan cenderung jalan ditempat. Sebagian besar usaha peternakan rakyat hampir tidak pernah menghitung seluruh biaya produksinya sehingga usaha peternakan rakyat akan kalah bersaing di pasar. Atau sebaliknya; akibat dari strategi pengembangan industri peternakan yang memanfaatkan peternakan rakyat sebagai bagian dari penyebaran resiko, dalam suatu sistem usaha. Atau para industri peternakan memanfaatkan skala kecil sebagai pendukung industri besarnya, mereka tidak mungkin akan menjadi industri dan harus tetap merupakan bagian dari sistem industri. Sehingga, peternakan rakyat malah menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya.
- Peternakan rakyat yang masih sulit bersaing oleh kehadiran korporasi, maka beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan daya saing peternakan rakyat adalah sebagai berikut : (a) diperlukan intervensi dengan konsep pengembangan industri peternakan berbasis bahan baku produksi dalam negeri. Hal ini menjadi faktor yang akan mampu menekan biaya produksi dan produktivitas. (b) perlu inovasi teknologi adaptif pada berbagai struktur usaha ternak, sehingga teknologi yang diadopsi sama halnya dengan teknologi di daerah lainnya yang produk peternakannya . Hal ini penting dalam upaya perlindungan teknologi bagi peternakan rakyat sekala kecil. (d) perlu intervensi permodalan melalui pendekatan kelompok usaha (kluster). Pendekatan individu usaha tidak akan lebih baik dan efisien bila dibandingkan dengan pendekatan kelompok. (e) perlindungan pasar dalam daerah terhadap serangan produk peternakan dari luar daerah melalui berbagai kebijakan fiskal maupun produk akhir teknologi.



3.1.4 Analisis atas Realisasi Kinerja

Penyebab capaian kinerja tidak tercapai karena intervensi melalui program/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan masih belum maksimal :

- Optimalisasi Reproduksi tahun 2024 dengan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi, jumlah straw yang di IB dan 2 Cair pada tahun 2024 hanya mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 10.839 ekor atau mencapai 75% dari target 14.400 ekor.
- Pengembangan ternak ruminansia tahun 2024, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 76 ekor, kambing/domba sebanyak 9 ekor.
- Masih tingginya kejadian penyakit gangguan reproduksi pada ternak ruminansia (Sapi dan Kerbau) yang tidak tertangani, karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
- Ketersediaan sumberdaya yang memiliki kompetensi teknis dan administrasi sangat terbatas.
- Kelompok tani ternak belum berfungsi optimal, masih bersifat formalitas (membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah
- Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif akibat fungsi pengendalian belum berjalan optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ternak betina produktif dalam menjaga populasi.
- Belum optimalnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan.
- Belum terintegrasi kegiatan dari hulu sampai hilir untuk produk peternakan yg dihasilkan yg menyebabkan nilai tambah belum optimal.

3.2. Ralisasi Anggaran

Tabel 3.20 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	6.990.344.552	6.613.724.887	94,61	100%	100%	100



No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pertumbuhan populasi temak	10.671.447.375	10.257.104.198	96,12	66,67%	71,42%	107,13
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase ketersediaan Prasarana peternakan yang memadai	16.284.132	16.277.700	99,96	100%	100%	100
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	405.789.527	384.047.565	94,64	82%	82,2%	100,2
		Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat				88%	90,97%	103,37
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha	22.446.890	22.295.270	99,32	67%	70%	104,48
6	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok temak yang kapasitas usahanya meningkat	514.910.519	479.900.750	93,2	3,41%	4,44%	130,2

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 18.621.222.995,- dari Anggaran murni sebesar Rp.14.030.934.060.- Realisasi Penyerapan anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 17.315.44.890,- (95,52 Persen) dan realisasi fisik kegiatan sebesar (100,33 Persen).

Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu.	3,29%	3,30 %	100,3	10.491.720.224	9.642.500.729	91,91%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A (80,20)	A (80,14)	99,93			

Secara umum, Penyerapan Anggaran untuk program dan kegiatan di Dinas Peternakan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 91,91% yakni

sebesar Rp. 9.642.500.729 dari alokasi Rp. 10.491.720.224. Hal tersebut dapat dikategorikan berhasil dengan baik karena adanya efisiensi anggaran.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi capaian kinerja per sasaran dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.22. Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	82,99	96,08	0,86
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,29	94,61	1,05

Pada sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 0,86. Hal ini dikarenakan target Indikator Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu tidak tercapai sehingga mempengaruhi persentase rata-rata capaian kinerja pada program ini. Pada tahun selanjutnya perlu diprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Sedangkan untuk indikator sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05.

Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisor yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan bidang Peternakan maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan ini maka kualitas sumberdaya yang profesional dan memiliki integritas, keahlian teknis menjadi prasyarat mutlak di Dinas Peternakan sehingga dapat mendukung optimalnya operasionalisasi teknis fungsional, misalnya dalam hal penyuluhan, ketersediaan sumberdaya aparatur bidang peternakan maupun medis kesehatan hewan (dokter hewan).

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memiliki 113 (seratus tujuh belas) Sumber Daya Manusia, meliputi 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 73 (tujuh puluh enam) orang tenaga kontrak (Non PNS). Susunan pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 3.23. Gambaran Umum Pegawai di Lingkup Dinas Peternakan Kab. Jombang Tahun 2024

Pegawai	Target	Ralisasi	Capaian (%)
PNS			
ESELON II	1 orang	1 orang	
ESELON III	4 orang	4 orang	
ESELON IV	2 orang	2 orang	
Fungsional Khusus	83 orang	9 orang	
Fungsional Umum	72 orang	15 orang	
P3K			
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	10 orang	10 orang	
NON PNS			
Tenaga Honorer Dinas	26 orang	25 orang	
Petugas IB Swadaya	38 orang	33 orang	
Tenaga Kontrak RPH	12 orang	12 orang	
TOTAL	248 orang	111 orang	44,76



Tabel 3.24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Sumberdaya Manusia	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	82,99	44,76	1,85
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,29	44,76	2,22

Dari tabel di atas didapati bahwa capaian realisasi sasaran terhadap ketersediaan sumberdaya manusia terdapat efisiensi sebesar 1,85% untuk indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu sedangkan untuk indikator sasaran kedua meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 2,22.

Efisiensi Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Peternakan yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan berupa gedung perkantoran dan gedung penunjang teknis yang ada di Dinas Peternakan :

1. Rumah Potong Hewan ada 4 (Jombang, Ploso, Mojoagung dan Ngoro)
2. Puskesmas ada 5 (Puskesmas Jombang, Ploso ,Ngoro, Diwek dan Mojoagung)
3. Klinik Hewan type C
4. Pusat Perbibitan Ayam Lokal (Chicken Development Centre)

Tabel 3.25 Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Tahun 2024

Pegawai	Target	Ralisasi	Capaian (%)
Sarana Penunjang (Gedung)	10 unit	10 unit	
Prasarana (laptop/Komputer, printer)	121 unit	50 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	5 unit	3 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	39 unit	30 unit	
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	5 unit	1 unit	
Meja dan Kursi Kerja	108 unit	95 unit	
TOTAL	293 unit	190 unit	64,51

Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standarisasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sedangkan permasalahan saat ini masih banyak pemotongan ilegal di luar RPH serta masih sedikit RPH yang ber-NKV.

Tabel 3.26 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	%Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Peternakan	Prosentase Pertumbuhan Produksi daging telur dan susu	82,99	64,51	1,29
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	99,29	64,51	1,54

Dari tabel di atas didapati bahwa capaian realisasi sasaran terhadap ketersediaan sarana dan Prasarana terdapat efisiensi sebesar 1,29% untuk indikator prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu sedangkan untuk indikator sasaran kedua meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 1,54%.

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

- Dinas Peternakan menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tergambar dari perolehan Nilai SAKIP tahun 2024 yaitu 78,03 dengan kategori BB.
- Penerapan Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP) pada peternak/ kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.



- Peningkatan kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (bebas, sporadik, endemik, dan wabah) seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis, dan pengawasan obat hewan .
- Memprioritaskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan.
- Mengajak keterlibatan stakeholders terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV dan registrasi produk hewan.
- Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar serta pelayanan informasi pasar.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Peternakan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Peternakan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam mendukung pembangunan sub sektor peternakan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator berupa :

- 1) Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 2,83% dari target sebesar 3,41%
- 2) Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 78,03 dari target 80,2.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran kinerja, prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 82,99% sedangkan prosentase nilai evaluasi SAKIP tercapai 99,29%. Sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dengan indikator Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu belum memenuhi target pada tahun 2024 dikarenakan meningkatnya populasi yang berbanding lurus dengan produksi terutama untuk ternak unggas dan mulai meningkatnya kembali daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi peternakan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang DPA Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.621.222.995, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.870.829.085, atau dengan serapan



dana APBD mencapai 95,36%. Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2024 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.750.393.910,00 atau 4,64%. Sisa anggaran ini karena efisiensi anggaran dari gaji dan tunjangan serta pengadaan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang belum optimal karena tidak memperhitungkan ketersediaan anggaran dan jumlah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Peternakan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dan khususnya untuk tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Namun demikian, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor; 2) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku, Septicaemia Epizootica, Avian Influenza, di beberapa Kabupaten Jombang yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 3) Masih tingginya struktur ongkos pakan karena adanya keterbatasan lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan tingginya harga bahan baku pakan olahan/konsentrat yang berpengaruh terhadap akses pakan dan nutrisi untuk ternak; 4) Produktivitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal; 5) Tingginya harga komoditas pangan asal ternak karena jaringan distribusi, infrastruktur dan akses yang belum memadai; 6) Belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi dalam pengembangan usaha peternakan, terutama sistem pendataan, sistem kesehatan hewan, inovasi pakan, serta sistem produksi; 7) Daya saing produk peternakan masih rendah; 8) Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semakin terbatas.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang telah melakukan upaya upaya dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBD dan non APBD. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak maka Dinas



Peternakan pada tahun 2025 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain: 1. Mendukung program percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu, 2. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga, provinsi dan stakeholder terkait. 3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan 4. Mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama percepatan vaksinasi PMK yang saat ini sedang merebak, baik kejadian maupun kasus di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang tahun 2024, semoga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang.

Jombang, Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN JOMBANG



Drs. MOCHAMAD SHALEH, M.Si

Pembina Utama Muda

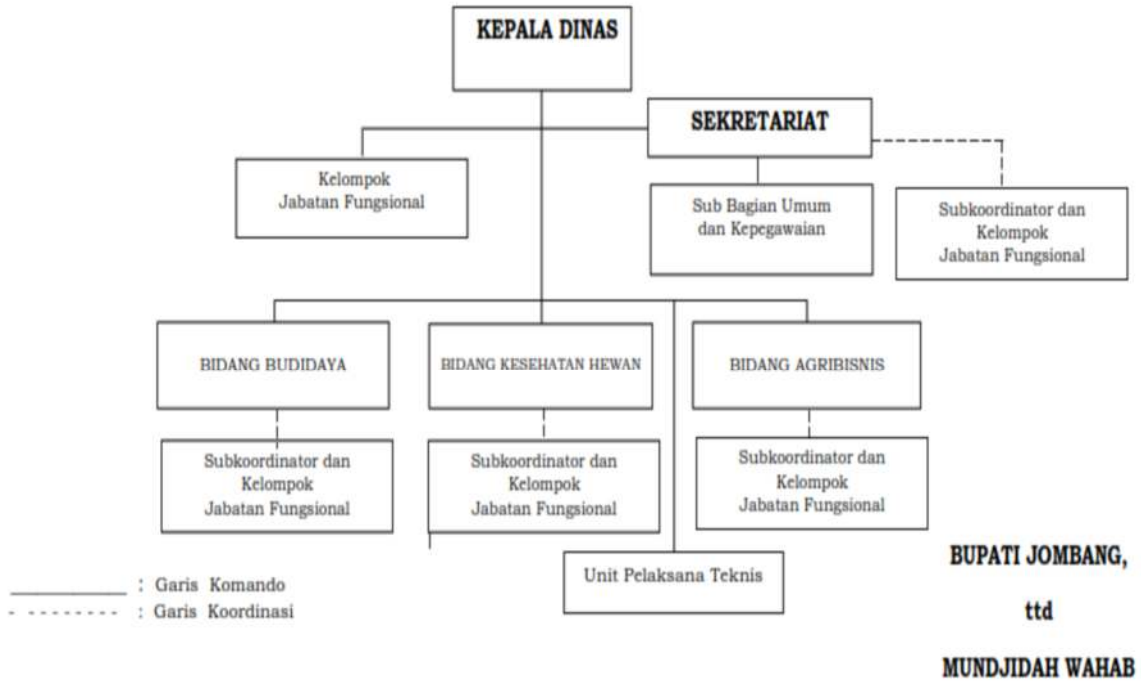
NIP. 19670917 199403 1 009



Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 91 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTERNAKAN KABUPATEN JOMBANG**





Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.1/31/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIAT, S.Sos., M.Pa.T.
Jabatan : Pj. Bupati Jombang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 15 Januari 2024
PIHAK PERTAMA Kepala
Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA Pj.
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Pa.T.

KODE UNIT : 415.20



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan identitas elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Standar, Nasional Indonesia (BESNI) 80239

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produk Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	3,41
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKP Perangkat Daerah	80,25

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terdapatnya Peningkatan Usaha Peternakan Daerah Kabupaten	Peningkatkan Usaha Peternakan Daerah Kabupaten	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	6.925.716.235
2.	Terdapatnya Peningkatan Populasi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	80,87 %	6.215.264.400
3.	Terdapatnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Uyah, dan Bebas dari Benda Berbahaya	92 % 98 %	108.125.752
4.	Terdapatnya Peningkatan Rekomendasi Usah Peternakan	Program Perbaikan Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Rekomendasi Usah Peternakan	87 %	88.968.795
5.	Terdapatnya Peningkatan Kinerja Ternak	Program Penyuluhan Peternakan	Persentase kelompok ternak yang mendapat pelatihan	3,41 %	476.206.119
					18.082.394.281

Jombang, 15 Januari 2024
PIHAK PERTAMA Kepala
Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA Pj.
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Pa.T.

KODE UNIT : 415.20



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan identitas elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Standar, Nasional Indonesia (BESNI) 80239



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 100/526/415.01/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 24 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

KODE UNIT : 415.20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan identitas elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Standar, Nasional Indonesia (BESNI) 80239

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produk Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	3,41
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKP Perangkat Daerah	80,25

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terdapatnya Peningkatan Usaha Peternakan Daerah Kabupaten	Peningkatkan Usaha Peternakan Daerah Kabupaten	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	6.990.344.552
2.	Terdapatnya Peningkatan Populasi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	80,87 %	16.671.447.376
3.	Terdapatnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Uyah, dan Bebas dari Benda Berbahaya	92 % 98 %	485.769.837
4.	Terdapatnya Peningkatan Rekomendasi Usah Peternakan	Program Perbaikan Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Rekomendasi Usah Peternakan	87 %	22.446.890
5.	Terdapatnya Peningkatan Kinerja Ternak	Program Penyuluhan Peternakan	Persentase kelompok ternak yang mendapat pelatihan	3,41 %	614.915.619
					18.621.222.895

Jombang, 24 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Peternakan

Ditandatangani secara elektronik



Drs. AGUS SUSILO SUGIOTO
NIP. 196412251990031004

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

KODE UNIT : 415.20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan identitas elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik, Standar, Nasional Indonesia (BESNI) 80239



Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2024

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1 NAMA : Drs. AGUS BUDILO BUDIOTO
 2 NP : 196412251990031004
 3 PANGKAT/GOLOK RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)
 4 JABATAN : Kepala Dinas Peternakan
 5 UNIT KERJA : Dinas Peternakan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah	IKI.1 Nilai Efikasi ASFP Perangkat Daerah	1 Mengkoordinasikan dan supervisi BAKIP Perangkat Daerah	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi BAKIP Perangkat Daerah	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi BAKIP Perangkat Daerah	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi BAKIP Perangkat Daerah	25%
2	Meningkatnya Produkut Peternakan	IKI.2 Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu	25%
3	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Perbaikan Sertifikasi Peternakan	IKI.1.1 Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rata-rata capaian Kinerja Aparatur	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rata-rata capaian Kinerja Aparatur	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rata-rata capaian Kinerja Aparatur	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rata-rata capaian Kinerja Aparatur	25%
		IKI.2.1 Persentase Perbaikan dan Pengembangan Sertifikasi Peternakan memadai	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Perbaikan dan Pengembangan Sertifikasi Peternakan memadai	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Perbaikan dan Pengembangan Sertifikasi Peternakan memadai	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Perbaikan dan Pengembangan Sertifikasi Peternakan memadai	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Perbaikan dan Pengembangan Sertifikasi Peternakan memadai	25%
3	Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan	IKI.2.2 Persentase Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis	25%
		IKI.2.3 Persentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat	25%
3	Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	IKI.2.5 Persentase Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	25%	1 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi lain Usaha	25%
		IKI.2.3 Persentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	25%	2 Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat	25%

Jombang, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Peternakan

Drs. AGUS BUDILO BUDIOTO
 N.P. 196412251990031004